

KONGRES WANITA INDONESIA KE-XII DAN PENGARUHNYA TERHADAP GERAKAN WANITA DI INDONESIA TAHUN 1961-1964

Winna Wijayanti (12407141009)
wijawinna@gmail.com

Abstrak

The Indonesian Women's Congress showed that in the XII Kowani congress generate significantly favor of the government in a period of Demokrasi Terpimpin. The strong influence arises from a mandate given by President Sukarno in the opening of the congress. One of the messages that drive the change that the women's movement required to support any government policy. So, there was a Kowani efforts to form functional organizations while maintaining femininity. The organization carrying out its functions limited to the work program, and are increasingly turning to the realm of praxis. While on the other hand, problems which are fighting for the rights of women, such as polygamy, eradicating illiteracy of women in remote regions, assisting women workers, increasingly sidelined as the government's political plan. All these issues can not be separated from the political system prevailing in Indonesia, so the pattern of women's movement got a big influence also on the upheaval that tookplace when it did. The debate was not spared in Kowani, between Perwari and Gerwani. The impact is felt in the Indonesian Women's Congress, their destination was split with each other to gather strength in each group.

Keywords: *Indonesian Women's Congress, Congress, Women's Movement.*

Abstrak

Dalam Kongres Wanita Indonesia ditunjukkan bahwa pada kongres Kowani ke-XII secara signifikan menghasilkan keberpihakan terhadap pemerintah dalam masa Demokrasi Terpimpin. Pengaruh kuat muncul dari amanat yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan kongres. Salah satu amanat yang mendorong adanya perubahan yakni gerakan wanita diwajibkan mendukung setiap kebijakan pemerintah. Maka timbullah upaya Kowani membentuk organisasi- organisasi fungsional dengan tetap menjaga sifat kewanitaan. Organisasi tersebut menjalankan fungsinya sebatas program kerja, dan semakin beralih ke ranah praksis. Sementara di sisi lain, persoalan yang bersifat memperjuangkan hak wanita, seperti poligami, upaya memberantas buta huruf kaum wanita di wilayah pelosok, pendampingan kaum buruh wanita, makin dikesampingkan karena rencana politik pemerintah. Semua persoalan tersebut tidak lepas dari sistem politik yang berlaku di Indonesia, sehingga pola gerakan wanita mendapat pengaruh besar juga dari pergolakan yang berlangsung ketika itu. Perdebatan pun tidak luput dalam Kowani, yakni antara Perwari dan Gerwani. Dampaknya terasa dalam kongres, yang mana arah tujuan mereka terpecah dengan saling mengumpulkan kekuatan di masing- masing golongan.

Kata Kunci: *Kongres Wanita Indonesia, Kongres ke-XII, Gerakan Wanita.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan diperjuangkan guna mengangkat martabat wanita, serta berguna terhadap pembangunan yang tidak hanya dalam peranan sebagai ibu rumah tangga (*domestic*), melainkan juga besar pengaruhnya terhadap kemajuan wanita dalam ranah umum (*public*). Pengertian lain menyebutkan bahwa tidak bisa gerak wanita sebatas dinilai melawan penjajah Belanda, akan tetapi lebih kepada pengembangan perannya. Peran yang dinilai meliputi bidang agama, filsafat, hukum, kesusastraan dan kesenian, ilmu pengetahuan, kesehatan, media massa, ekonomi dan kesejahteraan sosial.¹

¹ William H, Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005), hlm. 259.

Nilai-nilai patriarki yang masih berlaku dalam masyarakat Indonesia sebenarnya menggambarkan kedudukan wanita dalam berbagai hal selalu berada di bawah pria. Kondisi tersebut membawa kesan penomorduaan atas peran wanita. Dalam kurun waktu yang panjang wanita diikat pandangan umum yang berpangkal pada peran biologisnya. Dengan kodrat biologis hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam posisi yang dianggap terbatas itu, seakan-akan wanita telah termarginalkan oleh pria dengan perantara adat-istiadat dan budaya patriarki yang melekat di masyarakat.²

Dari nilai patriarki yang muncul, mulai hadir kesadaran untuk

² Djumarwan, *Laskar Putri Indonesia*, (Yogyakarta: Lembah Mana, 2010), hlm. 3.

melepas belenggu dari keterikatan tersebut, di mana wanita mulai muncul membawa gagasan-gagasan, seperti misalnya di abad ke-19 ada Raden Ajeng Kartini³ yang cukup berpengaruh. Meskipun tidak mengadakan pergerakan wanita secara langsung, akan tetapi surat-suratnya dengan MR. Abendanon dalam *Door Duisternis tot Licht* mendapat perhatian umum.⁴

³ Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, 21 April 1879 dari pasangan Raden Sosroningrat dan Raden Ajeng Ngasirah. Pada usia 12 tahun, Kartini lulus dari ELS dan ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, namun dalam usia itu ia harus menjalani tradisi pingitan. Tahun 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang, Adipati Djodjoningrat. Kartini menjalani poligami yang berlangsung dalam satu rumah tangga. Lebih lanjut lihat *Riwayat Singkat R.A. Kartini*, (Jepara: Dinas Pariwisata Kabupaten Dati II Jepara, Tanpa Tahun Terbit), hlm. 3-18.

⁴ Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai*

Menurut Kartini, jika wanita itu berpendidikan maka mereka akan mampu mendidik anaknya, dan juga mampu mengurus rumah tangga.⁵ Demikian itu akan menciptakan kemajuan bangsa yang berkelanjutan dimulai dari lingkup terkecil. Begitu pula dengan pergerakan wanita⁶ di Indonesia yang tidak terbentuk secara mendadak, melainkan karena adanya dorongan oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Mula-mula pergerakan

Kemerdekaan Jilid 1, (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm. 307.

⁵ R.A Kartini, *Door Duisternis toot Licht*, terj. Armijn Pane, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 20.

⁶ Soekarno menyebut “Pergerakan Wanita” dengan “Ladies Movement” yang dalam pidatonya pada Kongres Wanita Indonesia ke-XII ia menyatakan sifat “Ndoro Den Ayu” masih melekat dalam “Pergerakan Wanita”. Ia menyarankan untuk berubah dan menyesuaikan diri secara revolusioner. Lihat Majalah *Wanita*, “Dari Kongres Wanita Indonesia”, no. 3, Th. XIV, 15 Februari 1961.

wanita bertujuan untuk memperbaiki posisi wanita dalam kehidupan bermasyarakat dengan memilih meningkatkan pendidikan sebagai strategi dasar.⁷ Pergerakan itu juga memiliki nilai-nilai yang menjadi landasan pacu menjalankan organisasi yang meliputi persatuan, emansipasi wanita berdasarkan perikemanusiaan, dan kebangsaan. Pertumbuhan organisasi dalam kenyataannya beraneka warna karena menyesuaikan dengan kebutuhan zaman serta juga dipengaruhi orang-orang kreatif yang mampu memberi pembaharuan.⁸

⁷ Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 106-107.

⁸ Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1984), hlm. 127-128.

Tahun 1920-an terlihat kebangkitan nasionalisme berhasil menghimpun kekuatan di tengah masyarakat Indonesia. Di kalangan wanita keinginan untuk menyelenggarakan dan memajukan persatuan di antara organisasi-organisasi wanita mulai berkembang di tahun itu.⁹ Hingga masuk dalam periode 1960-an, yakni sejak politik pemerintah berlandaskan gagasan Demokrasi Terpimpin menimbulkan keadaan politik yang saling bertentangan.

Terdapatnya dua aliran politik yang besar pengaruhnya, yaitu golongan komunis dan bukan komunis berdampak pula terhadap pergerakan wanita. Persoalan yang muncul

⁹ Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Indonesia Tinjauan Ulang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. xxii.

mengartikan bahwa pergerakan wanita di Indonesia makin tidak menonjol dalam urusan memperjuangkan tuntutan feminis¹⁰ disebabkan karena lebih fokus membantu pemerintah dalam pembangunan nasional sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.¹¹

Kongres Wanita Indonesia (selanjutnya disingkat Kowani) merupakan kongres yang telah berlangsung dari sejak tahun 1928. Pada mulanya bernama Kongres

¹⁰ Tahun 1933, kamus *Oxford* memasukkan kata feminisme dengan arti “Pandangan dan prinsip-prinsip untuk memperluas pengakuan hak-hak perempuan”. Namun pengertian itu belum cukup, terkandung dua arti yang sangat penting yakni kesadaran dan perjuangan, sehingga dalam prosesnya menjadi sebuah ideologi atau gerakan (*movement*). Lebih lengkapnya lihat A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender Buku Pertama*, (Yogyakarta: Yayasan IKAPI dan Yayasan Indonesia Tera, 2004), hlm. xxvi-xxvii.

¹¹ Sukanti Suryochondro, *op.cit.*, hlm. 171.

Perempuan Indonesia (KPI) akan tetapi karena ada perubahan istilah yang menyesuaikan dengan perkembangan kebahasaan berubah menjadi Kowani. Selama tahun 1960- an memang terjadi bermacam-macam perubahan dalam kehidupan kepartaian sehingga mempengaruhi arah pergerakan wanita. Munculnya keanggotaan yang berhaluan kiri dengan mengadakan aksi dengan nama Gerakan Massa telah menuduh kinerja Kowani yang lamban. Namun telah berhasil ditangkis oleh Kowani sendiri sebab lama-kelamaan Gerakan Massa tidak terdengar gaungnya.

A. GERAKAN WANITA DI INDONESIA TAHUN 1945-1960

Iklm semangat atas kemerdekaan memberi pengaruh terhadap wanita khususnya yang berkaitan dengan dunia politik

pergerakan maupun keluarga. Perjuangan wanita pada masa ini memiliki kesempatan mengembangkan jiwanya dan lebih meningkatkan peranannya dalam keluarga dan masyarakat.¹² Setelah kemerdekaan, perjuangan wanita memang direpresentasikan dengan adanya organisasi-organisasi wanita baik yang muncul setelah kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Ada organisasi yang bergerak di bidang politik, dan ada pula yang bergerak di luar politik seperti bidang ekonomi dan kemanusiaan. Keberadaan organisasi wanita pada masa itu memberi pembelaan yang tegas terhadap wanita,

¹² Marwati Soewindi, *Sejarah Perjuangan Wanita dalam Pembangunan di Indonesia dan Dunia*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Wanita, 1997), hlm. 13.

ketika muncul situasi tertentu yang merugikan wanita.¹³

Namun demikian, perlu adanya pemahaman mengenai pembagian kerja secara seksual yang pada waktu itu memang marak diperjuangkan. Kita mengenal yang *pertama*, mereka yang mengatakan bahwa pembagian kerja seksual berlaku universal, tetapi tidak selalu berarti dominasi laki-laki. Sebelum kapitalisme masuk (melalui proses kolonialisme dan proses pembangunan zaman sekarang), pembagian kerja seksual bersifat komplementer dan perempuan memegang akses ke sarana produksi dan posisi-posisi kunci di dalam kehidupan politik.

¹³ Muhadjir Darwin, "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 7, No. 3, 2004), hlm. 287.

Akan tetapi, seiring dengan masuknya kapitalisme, posisi perempuan semakin digeser oleh laki-laki. Pandangan ini terutama dicanangkan oleh Eleanor Leacock, seorang ahli antropologi yang berperspektif historis-materialis, walaupun tak semua ahli dari perspektif ini mempunyai pandangan yang sama dengannya.¹⁴

Perspektif pembagian kerja yang *kedua* menurut Ester Boserup, yang mengatakan bahwa posisi perempuan secara tradisional tidak ter subordinasi, tetapi dengan kolonialisme menjadi termarginalisasi. Proses pembangunan bisa memperbaiki posisi mereka kembali.

¹⁴ Ratna Saptari dan Brigitte Holener, *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar*

Studi Perempuan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan Yayasan Kalyanamitra, 1997), hlm. 91.

Ketiga, ada pula yang mengatakan bahwa posisi perempuan selalu ter subordinasi baik pada zaman feodal, zaman kolonial, maupun zaman pascakolonial, tetapi bentuk subordinasinya berbeda-beda sesuai dengan sistem yang ada saat itu. *Keempat*, ada yang mengatakan bahwa subordinasi ada saat perempuan terkungkung dalam lingkup domestik dalam sistem feodal yang patriarkal.¹⁵

Pada umumnya pendekar-pendekar perjuangan wanita di Indonesia menunjuk pada adat sebagai pengekang kemajuan wanita. Adat ditanggapi sebagai kekuatan yang menempatkan wanita dalam kedudukan yang kurang terhormat dan tidak banyak memberikan peluang untuk memungkinkan pengembangan

¹⁵ *Ibid.*

daya dan kemampuan wanita. Adat digambarkan sebagai sumber segala ketidakadilan, pengekangan kebebasan dan kejahatan, terutama berkenaan dengan wanita.¹⁶ Dalam konteks penilaian terhadap kaum wanita yang memiliki peran ganda di masyarakat, yakni publik dan domestik.

Hal yang perlu disayangkan, dalam perjuangan wanita cenderung diberi arti yang terbatas. Pada umumnya hanya diartikan sebagai: *pertama*, perjuangan melawan penjajah. *Kedua*, perjuangan mengembangkan ranah pendidikan seperti yang dilakukan Kartini, Nyai Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, Kardinah, dan Rahmah El Yunusiyah. *Ketiga*, perjuangan politik yang dilakukan seperti Perserikatan

Perkoempoelan Perempoean Indonesia, Isteri Sedar, Fujinkai, dan Kongres Wanita Indonesia, seolah-olah hanya dalam bidang-bidang kegiatan inilah wanita dapat mengembangkan peranannya.¹⁷

Persoalan di atas sebenarnya makin dikuatkan dengan yang disampaikan oleh Sujatin Kartowijono. Ia memaparkan bahwa wanita yang berjuang dalam ranah politik jumlahnya tidak sedikit. Beberapa di antaranya keluar masuk penjara, bahkan ada yang sampai melewati masa pembuangan ke Boven Digoel oleh Belanda. Nama-nama tersebut antara lain Rasuna Said, Sri Panggihan, Ny. Ali Archam dan Trimurti.

¹⁶ William H. Frederick dan Soeri Soeroto, *op.cit.*, hlm. 254.

¹⁷ William H. Frederick dan Soeri Soeroto, *op.cit.*, hlm. 260.

Dalam kondisi masa pendudukan Jepang, seperti pembentukan Fujinkai mengharuskan istri-istri pembesar Indonesia ikut serta dalam usaha-usaha yang ditetapkan oleh Tentara Jepang. Langkah yang ditempuh oleh mereka misalnya menanam kapas dan lain-lain. Mereka turun ke lapangan bawah dan mendekati rakyat wanita. Penderitaan bangsa Indonesia, termasuk kaum wanita sangat dirasakan sekali.¹⁸

Sesudah Belanda kalah pada tahun 1949, seperti dalam kebanyakan perjuangan kemerdekaan nasional, para laki-laki pemimpin nasional giat mencari dukungan dari kalangan wanita. Lalu timbullah perhatian pada masalah-masalah wanita yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam

¹⁸ Sujatin Kartowijono, *op.cit.*,

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang barulahir itu (1945), kaum wanita dijamin hak-hak hukum dan politiknya sama seperti kaum laki-laki. Kaum wanitapun kemudian turut berhimpun menyokong cita-cita perjuangan nasional.¹⁹

B. PERKEMBANGAN KONGRES WANITA INDONESIA (KOWANI) TAHUN 1945-1960

Kelangsungan Kowani hanya terputus oleh zaman pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun yakni memang dilarang oleh penguasa untuk mengadakan kegiatan dalam bentuk perkumpulan yang tidak berhubungan dengan usaha membentuk Asia Timur Raya. Akan tetapi segera setelah Proklamasi Kemerdekaan diselenggarakan

¹⁹ Saskia Wieringa, *Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*, (Jakarta: Kalyanamitra, 1998), hlm.

kongres, yaitu tanggal 15-17 Desember 1945.

Sebab-sebab mengapa federasi organisasi-organisasi wanita itu bertahan selama ini dapat dicari dalam nilai-nilai yang menjadi dasar dari segala sikap dan perbuatannya. Nilai-nilai ini adakalanya secara eksplisit dirumuskan dalam pasal dari Anggaran Dasarnya dan seringkali hanya terkandung dalam tujuan yang dinyatakan. Nilai-nilai ini mendasari keberadaan organisasi, sehingga ada hubungan yang erat antara nilai, asas, dan tujuan, serta kegiatan. Sebelum kemerdekaan, asas KPI tahun 1938, antara lain: kebangsaan; kesosialan, yakni gagasan untuk memperbaiki masyarakat; sikap untuk saling menghargai; dan keperempuanan atau emansipasi. Akan tetapi yang paling menonjol ada tiga yaitu persatuan,

emansipasi berdasarkan kemanusiaan, dan terakhir kebangsaan.²⁰

Kembali ke nilai yang telah disepakati dalam Kowani, masing-masing nilai tersebut memiliki pemaknaan sejalan dengan proses yang sudah dilalui oleh organisasi. Dapat dikatakan bahwa dalam nilai persatuan nampaknya ada tarikan antara kecenderungan untuk mempertahankan kebebasan dalam masyarakat Indonesia yang demokratis. Ada juga kemungkinan bahwa timbulnya perkumpulan-perkumpulan baru sedangkan sesungguhnya telah disediakan perkumpulan yang mempunyai asas dan tujuan karena kurangnya komunikasi. Kendatipun persatuan itu merupakan nilai yang kuat, masyarakat Indonesia masih

²⁰ *Ibid.*, hlm. 97.

merupakan suatu *multigroup society* selama masih ada kebebasan untuk berserikat.²¹

Dalam usaha untuk mempertahankan persatuan maka Kowani selalu berikhtiar melayani semua pihak sehingga peraturan-peraturan diadakan sangat umum. Persoalan yang dapat menimbulkan perpecahan dihindari, maka perbedaan paham atau sikap yang dapat menyinggung perasaan mengenai agama atau mengenai aliran politik dihindari. Sikap ini memang menyebabkan bahwa Kowani dapat bertahan ataupun kalau perlu menjadi non-aktif sebentar, akan tetapi di lain pihak cara tersebut dianggap kurang efektif untuk memecahkan hal-hal

yang menyinggung prinsip tetapi perlu ditangani.

Ada pula mengenai emansipasi berdasarkan kemanusiaan, hal tersebut telah berulang kali ditegaskan dalam anggaran dasar. Dalam kongres tahun 1930 yang merupakan kongres penting yakni diletakkan dasar-dasar idiil dari Kowani yang menyatakan: "Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII) harus menjunjung keperempuannya, meneguhkan imannya, dan mendalami kebatinannya." Kemudian dalam kongres tahun 1938, ini ditegaskan lagi dalam rumusan: "Dalam penuntutan persamaan hak dan penghargaan kaum laki-laki, dasar keahlian, kelurusan hati, rasa tanggungjawab dan kebenaran harus dipegang seteguh-teguhnyanya."²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 99.

²² *Ibid.*, hlm. 102-103.

Sebelumnya, pada 1930, PPII berhasil mendirikan satu Badan Pemberantasan Perdagangan dan Anak-Anak (BPPPA) yang diketuai oleh Ny. Soekemi. Praktik *Cina Minding* yang meminjamkan uang kepada petani dengan bunga yang sangat tinggi, hingga tidak dapat dikembalikan oleh petani, mendapat perhatian perkumpulan ini. Sebab kerap kali gadis anak petani dijadikan penebusan dari pada hutang-piutang itu.

Ada juga laporan dr. Angelino tentang kejahatan dalam perusahaan batik (*de misdrijven in het batikbedrijf*) mendapat perhatian PPII, yang mengadakan rapat umum di Lasem untuk memberi kesadaran pada wanita

pembatik di situ. Hardjodiningrat dan Soejatin dikirim ke Lasem dengan penjagaan ketat, sebab dikabarkan ada

rencana pembunuhan terhadap kedua utusan ini. Sementara di Madiun dibentuk suatu panitia yang mengadakan rapat wanita untuk memprotes kejahatan itu juga yang dipimpin oleh Ibu Soediro.²³

Perhatian pergerakan wanita di Indonesia dicurahkan di segala bidang, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, melainkan juga di bidang pendidikan mulai dari pemberantasan buta huruf, penyelenggaraan sekolah taman kanak-kanak, dan seterusnya. Kemudian dalam bidang ekonomi diadakan koperasi dan pembangunan masyarakat desa. Untuk bidang perburuhan ada perbaikan nasib buruh wanita. Sementara lambat-laun permasalahan

²³ Sujatin Kartowijono, *op.cit.*, hlm. 6

merambah ke arah masyarakat umum seperti kependudukan, Keluarga Berencana (KB), dan narkoba.²⁴

C. PENGARUH KONGRES TERHADAP GERAKAN WANITA TAHUN 1961-1964

Perkembangan pergerakan wanita dalam masa Demokrasi Terpimpin sangat dipengaruhi oleh situasi politik negara bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa ini diawali dengan Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959. Dibentuk lembaga-lembaga baru Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perancang Nasional (DAPERNAS)

²⁴ Sukanti Suryochondro, *op.cit.*, hlm. 106-107.

dan Front Nasional dengan payung kepercayaan Nasionalis, Agama, dan Komunis atau kita kenal dengan Nasakom. Manipol Usdek ditetapkan sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada kenyataannya, Dekrit Presiden adalah pengambil-alihan seluruh wewenang pemerintah dan pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.²⁵

Suasana ketegangan sudah mulai mempengaruhi pergerakan wanita sejak Gerwani berhasil duduk dalam Pimpinan Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1957. Pengaruh Gerwani menjadi tambah besar, sejak struktur Kowani diubah pada Kongres ke-XII tahun 1961 di Jakarta. Pada

²⁵ Kongres Wanita Indonesia (Kowani), *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 139.

mulanya pimpinan dinamakan Sekretariat, kini berubah menjadi Dewan Pimpinan (DP) yang terdiri dari 9 organisasi yang akan memimpin secara bergilir dengan didampingi oleh seorang Ketua Koordinator. Intimidasi dan tekanan mulai dijalankan terhadap pemimpin-pemimpin organisasi wanita yang anti komunis.

Kongres Wanita Indonesia ke-XII pada awalnya direncanakan akan dilaksanakan di Yogyakarta, tetapi kemudian batal dan dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 6-9 Februari 1961. Terdapat usulan kepada pimpinan Angkatan Darat agar membentuk Panitia Penasehat Kesatuan Wanita Angkatan Darat serta pengangkatan 2 orang calon dari Kongres Wanita untuk Tenaga Inti Kesatuan Wanita Angkatan Darat (KOWAD) yaitu Ny. Kartimi

Tambunan Maulani dan Ny. Mulyati. Dibentuk pula tim *Steering Committee* (SC) dengan tugas menyusun acara kongres, rencana perubahan Anggaran Dasar Kongres Wanita Indonesia, tata tertib kongres, dan tata cara pemilihan. Sebagai catatan, organisasi wanita Muslimat Masyumi pada bulan Agustus 1960 membubarkan diri, sehingga keanggotaannya dalam Kowani terhenti.

Gedung yang digunakan selama kongres adalah Gedung Wanita, Jalan Diponegoro Nomor 26, Jakarta. Sebagai pimpinan tercatat lima pimpinan yaitu Ny. Maria Ulfah, S.H., Ny. Memet Tanumijaya, Ny. Burdah Yusupadi, Ny. Mahmudah Mawardi, dan Ny. Dr. Hurustiati Subandrio.

Dengan dihadiri oleh sebanyak 40 organisasi wanita.²⁶

Dalam kelangsungan kongres sangat menerima dan menghargai setinggi-tingginya amanah Pemimpin Besar Revolusi Indonesia sebagai pedoman perjuangan wanita. Oleh karenanya, kaum wanita Indonesia sesuai dengan kodratnya, harus melaksanakan perjuangan bersama-sama kaum laki-laki dalam menyelesaikan Revolusi Nasional, yakni menciptakan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur.

Pengaruh yang tercatat pascakongres maupun dalam situasi kongres yang sedang berlangsung merupakan pengaruh yang bersifat multidimensi. Sifat tersebut membawa pada kesimpulan nisbi sesuai data-data yang telah melewati verifikasi dengan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 144.

petimbangan bahwa fakta tersebut sejalan dengan konteks zaman pada periode tersebut. Penting untuk diketahui bahwa dalam kisaran tahun 1961-1964 telah diadakan kongres sebanyak 2 kali, yakni kongres ke-XII dan kongres yang ke-XIII.

Kedua kongres tersebut juga dilangsungkan di Jakarta dengan keputusan yang tidak jauh berbeda. Tetapi yang perlu dicatat adalah pada kongres tahun 1964, persoalan wanita sudah tidak disinggung lagi. Dalam kenyataannya, perjuangan pergerakan wanita Indonesia untuk mempertinggi derajat wanita justru menjadi kabur karena merosotnya penghargaan terhadap wanita oleh pemimpin negara. Seolah-olah wanita dianggap merupakan barang pameran dan hiasan saja. Dalam penyambutan pembesar-pembesar negara selalu ditampilkan

“Barisan Bhinneka Tunggal Ika” yang terdiri dari gadis-gadis muda dan cantik. Krisis akhlak merajalela di lapisan atas.²⁷

D. KESIMPULAN

Pada kenyatannya, sejarah wanita di Indonesia semakin ke sini semakin mengalami reduksi dengan pertanda bahwa permulaan itu bernama R.A. Kartini, tanpa ada persinggungan secara mendalam terkait tokoh perjuangan sebelumnya. Kondisinya sama dengan penulisan sejarah pergerakan wanita di Indonesia. Acuan tertinggi sebagai cita-cita utama adalah mendapatkan hak pendidikan bagi kaum wanita secara merata, dan itu sudah tercapai. Kemudian tuntutan berlanjut ke arah privat, yakni masalah perkawinan.

²⁷ Kongres Wanita Indonesia (Kowani), *op.cit.*, hlm. 141.

Organisasi wanita menentang keras adanya poligami yang memosisikan wanita dalam garis subordinasi. Upaya tersebut menuntut adanya campur tangan pemerintah perihal aturan hukum yang dirasa akan melindungi derajat kaum wanita.

Organisasi-organisasi tersebut terwadahi dalam satu lembaga yang terintegrasi seluruh Indonesia, yakni Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Landasan dari organisasi secara keseluruhan adalah satu nafas: sama-sama memperjuangkan kemajuan kaum wanita. Meski dalam praktiknya menjumpai ragam persoalan karena mereka juga berangkat dari partai-partai bersayap yang memiliki organisasi wanita tersendiri, sambil lalu memang menuai pro-kontra. Kendati pun tujuan awal sudah sejalan,

berhubung ideologi yang dianut oleh masing-masing partai di Indonesia bermacam-macam maka dampak terhadap gerakan wanita juga sangat terasa.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kongres yang telah dijalankan selama kurun waktu sejak Indonesia belum merdeka hingga sesudah merdeka, mampu menghadirkan catatan historis yang khusus melihat pola kerja yang dilakukan wanita di dalamnya. Sedikit banyak tentu memberikan kesan bahwa tuntutan-tuntutan yang diperjuangkan juga menjadi bagian dari proses keberlangsungan suatu negara. Dalam hal ini kita menilai sebagai keberpihakan yang sudah dimunculkan oleh organisasi-organisasi terkait. Penilaian itu bisa berupa ideologi yang dianut oleh masing-masing gerakan, dan di

Indonesia, gerakan wanita sampai masa setelah kemerdekaan melahirkan kelompok Islamis, Komunis, dan Militer. Meski saling menjunjung kewanitaan, tetapi upaya mereka menggunakan cara yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

ANRI, *Amanat Presiden Soekarno di Hadapan Kongres Wanita Indonesia di Gedung Wanita*, Djakarta, 6 Februari 1961, No. 270. A.

Buku

A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender Buku Pertama*, (Yogyakarta: Yayasan IKAPI dan Yayasan Indonesia Tera, 2004).

Djumarwan, *Laskar Putri Indonesia*, (Yogyakarta: Lembah Mana, 2010).

Kongres Wanita Indonesia (Kowani), *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978).

Marwati Soewindi, *Sejarah Perjuangan Wanita dalam Pembangunan di Indonesia dan Dunia*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Wanita, 1997).

Muhadjir Darwin, "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 7, No. 3, 2004).

R.A Kartini, *Door Duisternis toot Licht*, terj. Armijn Pane, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Ratna Saptari dan Brigitte Holener, *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan Yayasan Kalyanamitra, 1997).

Riwayat Singkat R.A. Kartini, (Jepara: Dinas Pariwisata Kabupaten Dati II Jepara, Tanpa Tahun Terbit).

Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

Saskia Wieringa, *Kuntulanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*, (Jakarta: Kalyanamitra, 1998).

Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid 1*, (Yogyakarta: LkiS, 2008).

Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1984).

Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Indonesia Tinjauan Ulang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

William H. Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005).

Majalah

Majalah *Wanita*, "Dari Kongres Wanita Indonesia", no. 3, Th. XIV, 15 Februari 1961.